

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT
PADA PEMILIHAN WALINAGARI AMPANG GADANG
KECAMATAN IV ANGKEK CANDUANG
KABUPATEN AGAM PERIODE 2008 – 2014**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Mencapai Gelar Sarjana Ilmu Politik
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas**

Oleh:
LENI AULIA
BP. 01 193 035



**JURUSAN ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2009**

ABSTRAK

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT PADA PEMILIHAN WALINAGARI AMPANG GADANG KEC. IV ANGKEK CANDUANG KAB AGAM PERIODE 2008-2014

Leni Aulia, di bawah bimbingan Dr. Azwar M.Si dan Drs. Tamrin, M.Si. Jurusan Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, terdiri dari 97 halaman dan 7 BAB, Universitas Andalas Padang 2009.

Penelitian ini menjelaskan apakah ada hubungan antara jenis pekerjaan responden, tingkat pengetahuan tentang penyelenggaraan dan kepercayaan pada penyelenggara pemilihan dengan partisipasi politik masyarakat nagari Ampang Gadang pada pemilihan wali nagari periode 2008-2014. Penelitian ini merupakan penelitian penjelasan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, kuisioner. Analisa data dilakukan dengan cara analisis *Chi Square* dan untuk melihat kekuatan hubungan antara variabel bebas dan terikat menggunakan Koefisien Kontigensi.

Pada pemilihan Walinagari Ampang Gadang menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat rendah yaitu sekitar 49 % dari 6015 pemilih tetap. Terdapat faktor-faktor penyebabnya, diantaranya pemilih yang bekerja baik di swasta maupun pegawai negeri sipil dan pelajar tidak bisa ikut memilih dikarenakan pelaksanaan pemilihan dilaksanakan pada hari kerja yaitu hari Kamis. Banyak masyarakat yang mengaku tidak tahu tentang proses penyelenggaraan pemilihan dan waktu pelaksanaan pemilihan itu sendiri. Termasuk di dalamnya tentang pengetahuan masyarakat akan manfaat dan pentingnya pemilihan wali nagari. Masyarakat juga kurang mempercayai penyelenggara pemilihan karena ada beberapa proses penyelenggara tidak transparan.

Berdasarkan analisis *chi square* yang dilakukan menunjukkan terdapat hubungan antara jenis pekerjaan dengan partisipasi, partisipasi responden yang bekerja dan pelajar rendah dikarenakan tidak bisa meninggalkan pekerjaannya. Ada hubungan tingkat pengetahuan responden tentang penyelenggaraan pemilihan dengan partisipasi politik masyarakat dalam hal menjadi tim sukses, ikut kampanye dan ikut memilih dan kekuatan hubungan antar variabel adalah lemah. Jadi semakin rendah tingkat pengetahuan semakin rendah pula partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan Wali Nagari Ampang Gadang. Tidak ada hubungan antara tingkat kepercayaan responden pada penyelenggara pemilihan dengan partisipasi politik pada pemilihan wali nagari Ampang Gadang periode 2008-2014.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Partisipasi politik merupakan unsur penting dalam kajian ilmu politik, karena partisipasi politik ialah keikutsertaan warga negara biasa dalam menentukan segala keputusan yang menyangkut atau mempengaruhi hidupnya.¹ Dengan arti kata tanpa adanya partisipasi politik, maka sistem yang ada tidak merupakan manifestasi dari keinginan warga negara, apabila hal ini terjadi maka sistem yang sedang berjalan tidak akan bertahan lama.

Partisipasi politik dapat dilakukan melalui : *satu* prosedur yang wajar (konvensional) seperti ikut memilih dalam pemilihan umum, mengajukan petisi, melakukan kontak tatap muka, dan menulis surat. *Dua* cara-cara di luar prosedur yang wajar (tak konvensional) seperti demonstrasi (unjuk rasa) pembangkangan halus, huru hara, mogok, pembangkangan sipil, serangan bersenjata, dan gerakan-gerakan politik seperti kudeta dan revolusi.²

Kegiatan pemilihan adalah salah satu bentuk partisipasi politik yang sering kita jumpai, baik itu pemilihan anggota dewan dari pusat sampai daerah maupun pemilihan kepala negara dan kepala daerah. Pemilihan kepala daerah lahir dikarenakan adanya Otonomi Daerah,

¹ Ramlan Surbakti. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 1992, hlm. 140

² *Ibid.*, hal 141-142

karena Otonomi daerah merupakan sistem yang memungkinkan daerah untuk memiliki kemampuan untuk mengoptimalkan potensi terbaik yang dimilikinya dan mendorong daerah berkembang sesuai karakteristik ekonomi, geografis dan sosial budayanya.

Otonomi daerah mempunyai beberapa aspek yaitu *Pertama*, dari segi politik yaitu mengikutsertakan, menyalurkan inspirasi dan aspirasi masyarakat baik untuk kepentingan daerah sendiri maupun mendukung politik dan kebijakan nasional dalam rangka pengembangan proses dan mekanisme demokrasi di lapisan bawah. *Kedua*, dari segi manajemen pemerintahan yaitu untuk meningkatkan daya dan hasil guna dalam pelayanan publik. *Ketiga*, dari segi kemasyarakatan yang meningkatkan partisipasi masyarakat. *Terakhir*, dari aspek ekonomi pembangunan yaitu untuk melancarkan program pembangunan dalam meningkatkan dan mencapai kesejahteraan rakyat.³

Sumatera Barat menerapkan Otonomi Daerah dengan sistem *Ba Baliak Ka Nagari*, yang diatur dalam Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 2 tahun 2007 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari. Maksudnya, Sumatera Barat kembali menerapkan sistem-sistem pemerintahan yang dulunya pernah diterapkan di provinsi ini pada masa sebelum tahun 1970an. Sistem pemerintahan nagari ini sangat dekat dengan sistem adat-istiadat yang berlaku di tengah masyarakat Minangkabau yang merupakan suku dominan mayoritas di

³Dr. Florianus Aser, Msi, 1 Februari-Maret dalam *Jurnal Otonomi Daerah*, 2005, Vol V,

provinsi ini. Diyakini dengan penerapan sistem pemerintahan nagari ini akan mampu untuk menyerap lebih banyak aspirasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerintahan.

Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan filosofi Minangkabau (*adat basandi Syara, Syara basandi Kitabullah*) dan atau berdasarkan asal usul adat setempat.⁴ Penyelenggaraan urusan pemerintahan nagari yang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat nagari dilaksanakan oleh Pemerintah Nagari dan Badan Musyawarah Nagari. Pemerintah Nagari terdiri dari Wali Nagari dan perangkat nagari⁵. Sebagai pimpinan pemerintahan nagari dipegang oleh Wali Nagari.⁶

Sesuai dengan Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 2 tahun 2007 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari, maka Wali Nagari dipilih secara langsung oleh warga masyarakat nagari.⁷ Pemilihan Wali Nagari dilakukan apabila masa jabatan Wali Nagari sudah hampir habis sekurang-kurangnya 4 (empat bulan) sebelum habis masa jabatan. Hal ini dilakukan untuk menghindari adanya kekosongan kekuasaan (*vacum of power*), terutama dalam hal pelaksanaan pelayanan publik kepada masyarakat.

⁴ Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat No. 2 Tahun 2007 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari. Pasal 1 ayat 7

⁵ *Ibid.* Pasal 1 ayat 8

⁶ *Ibid.* Pasal 1 ayat 9

⁷ *Ibid.* Pasal 7

BAB VII PENUTUP

7.1 Kesimpulan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan jenis pekerjaan, tingkat pengetahuan tentang penyelenggaraan pemilihan, dan tingkat kepercayaan pada penyelenggara pemilihan terhadap partisipasi politik (ikut memilih, tim sukses, dan ikut kampanye. Dan hasil dari pengujian hipotesis tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Ada hubungan jenis pekerjaan dengan partisipasi politik masyarakat pada pemilihan Wali Nagari Ampang Gadang Kecamatan IV Angkek Canduang Kabupaten Agam periode 2008-2014. Karena responden yang bekerja baik di swasta dan pegawai negeri sipil serta pelajar tidak bisa meninggalkan pekerjaannya.
- b. Ada hubungan tingkat pengetahuan masyarakat tentang penyelenggaraan pemilihan dengan partisipasi politik masyarakat pada pemilihan Wali Nagari Ampang Gadang Kecamatan IV Angkek Canduang Kabupaten Agam periode 2008-2014. Disebabkan oleh rendahnya tingkat pengetahuan masyarakat tentang penyelenggaraan pemilihan semakin rendah pula partisipasi.
- c. Tidak ada hubungan tingkat kepercayaan masyarakat pada penyelenggara pemilihan dengan partisipasi politik masyarakat pada pemilihan Wali Nagari Ampang Gadang Kecamatan IV Angkek Canduang Kabupaten Agam periode 2008-2014

Daftar Pustaka

Buku-Buku Rujukan atau Teori

- Kencana, Ibu, *Ilmu Politik*, Rineka Cipta, Jakarta, 1997
- Maran, Raga Rafael *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2001
- Marbun, BN, *Kamus Politik*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1996
- Masoed, Mochtar, *Perbandingan Sistem Politik*, Yogyakarta, Gajah Mada University Press, 2001
- Simangunsong, Bonar, *Negara, Demokrasi dan Berpolitik yang Profesional*, Gramedia, Jakarta, 2004
- Surbakti, Ramlan. *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 1992
- Sudijono Sastroatmodjo, *Perilaku Politik*, IKIP Semarang Press, Semarang, 1995
- Samuel P. Huntington dan Nelson, Joan. *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994
- Rush, Michael & Althof, *Pengantar Sosiologi Politik*, Rajawali Pers, Jakarta, 2000

Buku-Buku Metodologi

- Aslan, Sumbudi, *Komposisi Desain Riset* Jakarta, Lembaga Penerbit Trisakti, 1986
- Nugroho, Bhuono Agung, *Strategi Jitu Memilih Metode Statistik Penelitian Dengan SPSS*, Andi Yogyakarta, Yogyakarta, 2005
- Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal.*: Bumi Aksara, Jakarta, 1993
- Singarimbun, Masri .. *Metode Penelitian Survey*. Jakarta: LP3ES 1987
- Sugiarto dkk.. *Teknik Sampling* . Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama 2001